



Habitus patriarki pemilihan calon Kepala Sekolah di SMA Negeri Sumenep

Akbar Mawlana

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur – Indonesia

akbar.18002@mhs.unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim July 12, 2022

Direvisi November 14, 2022

Terbit June 1, 2023

Keywords: *Habitus, Capital, Headmaster, Female Teachers, Male Teachers.*

Kata Kunci: *Habitus, Modal, Kepala Sekolah, Guru Perempuan, Guru Laki-laki.*

Abstract

The school in Sumenep is still a space that reproduces patriarchy. Documentation data at two high schools, SMAN 1 Kalianget and SMAN 1 Sumenep, show that for 15 years the majority of teachers selected to participate in the selection of principal candidates were male teachers. This study aims to analyze the patriarchal habitus of selecting prospective principals at SMAN 1 Sumenep and SMAN 1 Kalianget. So far, the selection of school principal candidates has been a contested space that is full of conflicts, but is often forgotten. The method used is qualitative with a Schutz phenomenological approach. Interviews, observations, and documentation became tools for data collection. Through Bourdieu's theory, the result is that the reproduction of the patriarchal teacher selection to participate in the selection of prospective principals occurs due to the defeat of female teachers' accumulated capital with male teachers. In addition, there is the politicization of religion and matrilineal relations with patriarchy being the main habitus. This condition causes female teachers to experience defeat in an arena.

Sekolah di Sumenep masih menjadi ruang yang mereproduksi patriarki. Data dokumentasi dari dua sekolah, SMAN 1 Kalianget dan SMAN 1 Sumenep, menunjukkan selama 15 tahun guru yang terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah mayoritas berasal dari guru laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis habitus patriarki pemilihan calon kepala sekolah di SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget. Selama ini, seleksi pemilihan calon kepala sekolah menjadi ruang kontestasi yang penuh konflikual dan pendistorian perempuan, tetapi sering terlupakan sebagai kajian ilmiah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Schutz. Wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi alat untuk pengumpulan data. Analisis menggunakan teori habitus dari Bourdieu. Melalui teori Bourdieu, memperoleh hasil bahwa reproduksi

patriarki pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah terjadi akibat kekalahan akumulasi modal guru perempuan dengan guru laki-laki. Ditambah lagi adanya politisasi agama dan matrilineal yang berkelindan dengan patriarki menjadi habitus utamanya. Kondisi itu yang menyebabkan guru perempuan mengalami kekalahan dalam sebuah arena.

Pendahuluan

Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Kemendikbud (2021) yang memperlihatkan jumlah guru di Sumenep berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: jenjang SMP ada 3.529 guru laki-laki dan 2.681 guru perempuan; jenjang SMA terdapat 1.356 guru laki-laki dan 960 guru perempuan; jenjang SMK terdapat 690 guru laki-laki dan 420 guru perempuan. Kendati demikian, minimnya perempuan Sumenep dalam profesi guru bukan persoalan yang cukup dilematis. Persoalan yang lebih esensial, kusut, dan prinsipil hadir dari laki-laki yang mendominasi struktur kepala sekolah di SMAN Negeri Sumenep. Hal itu menjadi pembuktian data survei dari *The Conversation* (2020) yang memperlihatkan jika kepala sekolah di Indonesia mengalami jumlah yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Minimnya perempuan Sumenep mengakses profesi guru dan posisi kepemimpinan menjadi gambaran jika patriarki masih mengakar.

Minimnya perempuan dalam memimpin sekolah terjadi akibat penafsiran budaya dan ketimpangan struktural. Secara kritis, guru perempuan menjadi korban dari politisasi pengetahuan dalam ruang akademik. Kajian Bernal, dkk. (2017) menegaskan ada bias gender dalam pemilihan seleksi calon kepala sekolah. Kondisi yang mendistorsi guru perempuan dalam mengikuti seleksi calon kepala sekolah terlihat jelas di SMAN 1 Sumenep. Berdasarkan data dokumen SMAN 1 Sumenep, memperlihatkan selama 15 tahun guru yang dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah mayoritas berasal dari guru laki-laki. Yakni, H. Moh. Sadik (2005), Syamsul Hidayat (2010), Salehoddin (2010), H. Maswiyanto (2012), Hidayat Raharja (2012), Halimurrahman (2020), dan Achmad Junaidi (2020). Padahal, jika mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dari 29 guru perempuan SMAN 1 Sumenep, terdapat 13 guru perempuan yang layak mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Tidak jauh berbeda dengan kondisi di SMAN 1 Kalianget yang juga menyingkirkan guru perempuan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Berangkat dari dokumen SMAN 1 Kalianget tergambar selama 15 tahun hanya

guru laki-laki yang diikutkan seleksi calon kepala sekolah, yakni, Hermono Prayudi Anggor (2005), Sukarman (2010), Untung Slamet (2010), Moh. Tahir (2012), Ali Suroso (2021), dan Abdullah (2021). Secara akumulatif, kehadiran guru perempuan di SMAN 1 Kalianget yang layak mengikuti seleksi calon kepala sekolah ada 11 orang dari 25 guru perempuan.

Berbagai kajian tentang keterbatasan perempuan menjabat sebagai kepala sekolah telah banyak dilakukan. Penelitian Jatningsih (2016) dan Kusi (2019) yang melihat faktor penghambat guru perempuan meningkatkan jabatannya sebagai kepala sekolah akibat beban ganda di keluarga. Berbeda dengan penelitian Badrus & Wahyuni (2019) menguraikan bahwa penyebab guru perempuan sulit menduduki posisi kepala sekolah adalah adanya interpretasi agama. Agama sering menjadi momok menakutkan bagi perempuan dengan tafsirnya sering melemahkan posisinya (Fauzi, 2017). Studi dari Airin (2010); Prastiwi & Rahmadanik (2020) pengumpulan datanya memperlihatkan jika masih terdapat penafsiran bahwa perempuan tidak perlu bekerja dengan jabatan yang terlalu tinggi. Penelitian sebelumnya belum menggunakan paradigma kritis, sehingga riset Gaus (2011); Mulawarman (2015); Dzuhayatin & Edwards (2010) melalui paradigma kritisnya menguraikan bahwa akar ketertindasan guru perempuan terjadi adanya kurangnya bimbingan dari kepala sekolah, serta rumitnya rekrutmen. Sehingga, guru perempuan mengharapkan adanya perubahan regulasi. Mythili (2017) melalui pendekatan wacanan menunjukkan minimnya wacana peluang untuk menjadikan guru perempuan sebagai kepala sekolah

Namun, berbagai penelitian terdahulu memiliki dua perbedaan dengan penelitian ini. Pertama, belum melihat dari akar persoalan, yakni proses pemilihan calon guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Padahal, guru sebelum mengikuti seleksi calon kepala sekolah harus melalui proses terlebih dahulu dari sekolah (Media Kepala Sekolah, 2020). Kedua, belum menganalisis fenomena keterbatasan kepala sekolah menggunakan habitus. Dominasi laki-laki sebagai kepala sekolah di SMAN Sumenep telah menjadi ketidaksadaran kultural. Habitus merupakan kompabilitas yang telah menyatu dengan pengalaman kehidupan, hingga menghasilkan praktik sosial melalui keberadaan akumulasi modal dan habitus dalam sebuah arena (Bourdieu, 2020a). Secara kritis, kehadiran modal tidak bisa terpisahkan dalam praktik sosial. Bourdieu lebih mengklasifikasikan modal lebih komplisit, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik (Haryatmoko, 2016). Dari keempat modal tersebut, modal ekonomi dan modal budaya lebih fundamental (Bourdieu, Wacquant, & Farage, 1994).

Keberadaan habitus juga menjadi salah satu momok yang menakutkan dalam pendidikan. Sebagaimana kajian Reay (2004) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa kehadiran habitus telah membuat ketidakadilan dalam pendidikan di Inggris. Temuan Reay ikut diperkuat dengan temuan Toyibah (2017) yang menjelaskan bahwa kepasifan perempuan dalam politik kampus akibat pembentukan habitus di keluarga dengan tidak memberikan ruang gerak dan kebebasan memilih. Dampak habitus terhadap pelemahan perempuan juga menyentuh aspek dunia teknologi dan ekonomi. Novarisa (2019) memperlihatkan jika sinetron ikut membentuk habitus wilayah domestik, sekaligus pembungkaman suara perempuan melalui produksi adegan dan bahasa. Tidak jauh berbeda dengan temuan Maulana (2021) bahwa media sosial telah menjadi ruang penundukan perempuan melalui meme yang tersalurkan dengan terselubung. Begitu juga di bidang aspek ekonomi, terutama perempuan desa saat pandemi Covid-19 ikut terpinggirkan mata pencahariannya akibat persepsi bahwa perempuan yang bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan sekolah anaknya di rumah.

Secara substansial, penelitian perihal habitus dan pembatasan perempuan telah menyentuh aspek pendidikan. Namun, belum menyentuh esensi habitus terhadap pelemahan perempuan dalam proses pemilihan seleksi calon kepala sekolah. Maka dari itu, penelitian ini selain mengembangkan kajian terdahulu tentang keterbatasan perempuan untuk menjadi kepala sekolah, juga mengembangkan kajian tentang pelemahan perempuan melalui pembentukan habitus di sekolah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan meneliti reproduksi patriarki dalam pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah di SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Schutz, yang berorientasi pada prasyarat terjadinya tindakan sosial (Costelloe, 1996) dan memiliki esensi memahami kesadaran subjek dalam *lifeworld* (Supraja & Akbar, 2020: 157). SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget menjadi lokasi penelitian. Terdapat dua alasan menggunakan dua sekolah tersebut. Pertama, berasal dari data Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Sumenep (2021) bahwa SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget merupakan sekolah yang aktif dan responsif mengirimkan gurunya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Kedua, SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget memiliki nilai historis sebagai sekolah favorit sejak berdirinya. Sebab, SMAN 1 Sumenep menjadi sekolah pertama di Kota dan terus eksis hingga

sekarang. Sedangkan, SMAN 1 Kalianget menjadi sekolah kedua yang lokasinya di luar kota dan tetap diminati oleh masyarakat Sumenep.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Wawancara tidak terstruktur merupakan cara pengumpulan data di lapangan, karena lebih bersifat terbuka (Jaya, 2020). Hal itu membantu peneliti saat memperdalam data, lantaran selama wawancara peneliti dan informan tidak merasa canggung. Pendekatan peneliti secara intens dan humanis kepada pimpinan lembaga dan informan lainnya memberikan akses kemudahan saat melakukan observasi. Informan melakukan observasi saat formal dan informal. Observasi formal dilakukan saat berada di sekolah, sedangkan observasi informal terjadi saat peneliti diajak bermain badminton oleh tim SMAN 1 Kalianget dan SMAN 1 Sumenep. Selain itu, peneliti berkesempatan untuk berdarmawisata dengan keluarga besar SMAN 1 Sumenep. Kondisi tersebut menjadikan observasi bersifat partisipatif pasif. Observasi partisipatif pasif terjadi ketika peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak melakukan aktivitas secara menyeluruh (Sugiyono, 2020). Dokumentasi berorientasi pada dokumen sekolah yang berkorelasi dengan struktur dan kebijakan kepala sekolah, serta foto rapat. Informan yang digunakan adalah kepala sekolah, wakasek, guru laki-laki, dan guru perempuan dengan kategori sudah menjadi PNS. Informan penelitian ini berjumlah 11 orang.

Data yang terkumpul, kemudian dilakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Salim, 2006). Reduksi data merupakan proses memilah dan menyederhannaka data dari pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi (Jaya, 2020). Penyajian data merupakan pendiskripsian informasi yang sudah tersusun (Salim, 2006). Entitas penyajian data melalui narasi yang berhubungan dengan kronologi peristiwa. Selain itu, dalam penyajian data juga memakai data visual berupa foto. Kemudian, tahap terakhir adalah melakukann penarikan kesimpulan.

Akumulasi Modal SMAN 1 Kalianget: Memperteguh Kemapanan Guru Laki-Laki

Sekolah menjadi ruang yang sulit terlepas dari simbolisasi pendidikan. Bourdieu (1988) memperlihatkan pertarungan modal budaya berupa sumber bacaan dan tingkatan pendidikan menjadi krusial bagi akademikus untuk menghasilkan

kemenangan di perguruan tinggi. Kondisi ini juga terjadi di SMAN 1 Kalianget yang juga menggunakan modal budaya terlembagakan sebagai acuan pemilihan wakasek dan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Modal budaya terlembagakan dapat berupa gelar akademik dan sertifikat akademik (Bourdieu, 1986). Wakasek yang sering terpilih di SMAN 1 Kalianget merupakan guru yang memiliki gelar akademik magister, sekalipun lebih banyak yang terpilih menjadi wakasek merupakan guru bergelar sarjana. Bapak AM dan TR merupakan guru di SMAN 1 Kalianget yang memiliki gelar magister yang menduduki kursi wakasek. Tidak terbantahkan jika tindakan pendidikan di Sumenep masih menghargai individu yang bergelar magister karena terkonstruksi sebagai agen yang memiliki kemampuan. Padahal, gelar magister tidak selamanya menjamin mutu intelektualitas seseorang. Konstruksi kemampuan gelar pendidikan ikut mempengaruhi pada pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Bapak TR yang sebelumnya menjabat sebagai wakasek kurikulum berhasil merangsek untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. TR menggunakan modal budayanya berupa gelar dan pengalamannya menjadi wakasek untuk terpilih mengikuti seleksi calon kepala sekolah.

Selain menggunakan gelar akademik, sertifikat dari *workshop* dan diklat juga menjadi modal budaya yang terlembagakan. Hampir setiap guru terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah memiliki modal budaya berupa sertifikat akademik. Bapak TR, HR, SN, AS, dan US sering mengikuti *workshop* dan diklat yang biasanya diselenggarakan oleh dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Budaya. Penggunaan modal budaya yang terlembagakan menjadikan guru laki-laki lebih mendominasi daripada guru perempuan. Sebab, kebanyakan guru perempuan di SMAN 1 Kalianget merasa enggan untuk berkuliah hingga S2. Berdasarkan data guru SMAN 1 Kalianget (2021) menunjukkan jika jumlah guru perempuan yang bergelar magister hanya terdapat satu orang. Alasan utama guru perempuan enggan berkuliah hingga magister adalah tidak memperoleh izin untuk berkuliah magister oleh orang tua atau suami. Pelarangan perempuan oleh suami atau keluarga menjadi siluet bahwa politisasi tubuh melalui regulasi dan kuasa pengetahuan menjadi “penjara” yang memberanguskan ruang gerak perempuan (Raditya, 2014). Ibu FD dan KL merupakan guru perempuan di SMAN 1 Kalianget yang menyatakan bahwa dirinya sempat memiliki keinginan untuk berkuliah S2, tetapi setelah menikah merasa malas karena memiliki banyak urusan yang harus dikerjakan. Terjadinya politik tubuh melalui kuasa laki-laki juga menyebabkan

guru perempuan merasa malas jika harus mengikuti *workshop* dan diklat, karena harus mengurus keluarga juga. Teraktualisasikan dari data observasi terhadap ibu HV yang harus menjadi orang tua tunggal di rumah, lantaran suaminya bekerja di luar Madura. Alhasil, dirinya mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara tugas sekolah dengan tugas rumah.

Pembentukan modal budaya yang terlembagakan di SMAN 1 Kalianget juga membutuhkan modal ekonomi. Mengingat, untuk mencapai pendidikan hingga strata magister membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besarnya pengeluaran biaya menjadi dampak dari kapitalisasi pendidikan yang terus berjalan dengan ciamik (Arif, dkk., 2020). Bapak TH dan HR memaparkan jika biaya pendidikan magisternya membutuhkan biaya yang ekstra untuk biaya pendidikan dan hidup di kota rantau. Berbeda dengan bapak ADM yang mengeluarkan biaya pendidikan magister lebih sedikit, karena biaya pendidikannya berasal dari beasiswa. Meski memerlukan modal ekonomi dalam pembentukan modal budaya, namun tidak bersifat esensial dalam pemilihan calon kepala sekolah. Secara historis, kepala sekolah di SMAN 1 Kalianget tidak pernah mempergunakan modal ekonomi dalam memilih kandidat guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah.

Namun, keberadaan modal budaya terlembagakan juga memerlukan modal sosial agar dapat teraktualisasikan dengan baik. Modal sosial di SMAN 1 Kalianget lebih terbentuk melalui permainan badminton. SMAN 1 Kalianget memiliki komunitas badminton bernama PB Kaliber. PB Kaliber terbentuk kurang lebih tahun 2006 yang berisi guru, TU, dan kepala sekolah. Sejarah pembentukan PB Kaliber bertujuan sebagai wadah untuk melepaskan penat setelah seharian bekerja di sekolah. Latihan rutin PB Kaliber sebanyak 2 kali dalam satu minggu. Kehadiran PB Kaliber telah menjadi wadah untuk penguatan solidaritas sosial pada kelompok sekolah. Penguatan solidaritas terbentuk melalui kesamaan fakta sosial yang melingkupi aktivitasnya (Durkheim, 1984). Namun, eksistensi perempuan di PB Kaliber tidak ada sepenuhnya. Padahal, beberapa pengajar perempuan di SMAN 1 Kalianget ada yang berkeinginan untuk mengikuti permainan badminton di PB Kaliber. Ketiadaan akses guru perempuan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah mendukung temuan dari Kushendra (2021) dan Utomo (2014) yang memperlihatkan bahwa perempuan sering menjadi *second sex* akibat pemaknaan yang irasional. Data ini juga menjadi pengembangan kajian sosiologi olahraga yang hanya terbatas pada konflik, fanatisme, dan penyaluran ideologi melalui media (Abduh, 2020; Nurdiana & Andriany, 2013; Prastyana, 2016). Berbagai kajian

terdahulu belum melihat bahwa olahraga menjadi medium pembentukan modal sosial, hingga menyentuh aspek pendistorsian perempuan.

Proses pembentukan modal sosial melalui permainan badminton dapat terbentuk mengingat histori PB Kaliber sering terdapat kepala sekolah yang juga gemar bermain badminton. Bapak SN yang merupakan mantan guru di SMAN 1 Kalianget merupakan aktor pembentukan PB Kaliber. Dirinya memiliki keakraban dengan manta kepala sekolah dahulu. Kepala sekolah sering melakukan interaksi dengan bapak SN, baik di sekolah dan di lapangan badminton. Interaksi yang terjadi di sekolah dan lapangan badminton semakin mengukuhkan keintiman keduanya, hingga menghasilkan modal sosial. Modal sosial terbentuk melalui pengkuhan berdasarkan intensitas interaksi dengan orang lain (Bourdieu, 1986).

Tidak jauh berbeda dengan bapak TR dan AS yang juga menjadikan permainan badminton sebagai ruang pembentukan modal sosial. Hanya sedikit berbeda dengan SN yang melakukan interaksi secara langsung dengan kepala sekolah. Sedangkan, TR dan AS lebih membentuk keintiman terlebih dahulu dengan SN yang awalnya merupakan wakasek kesiswaan. SN yang memiliki kharismatik di sekolah mampu memberikan pengaruh esensial untuk menjadikan TR dan AS terpilih sebagai wakasek, hingga akhirnya terpilih juga untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Mengingat konsep Weber (2009) bahwa kharismatik merupakan nilai yang penting untuk mempengaruhi realitas sosial. Tidak mengherankan jika ketiganya bisa mengakumulasi modal sosialnya menjadi sebuah keuntungan pribadi. Sebab, untuk mengikuti calon kepala sekolah secara tidak tertulis harus memiliki kedekatan dengan kepala sekolah. Siluet itulah yang menjadikan sekolah menjadi dimensi hitam yang telah tercampur dengan tindakan politisasi pendidikan. Wajah pendidikan di era modern berkelindan dengan politik (Freire, 2007) dan bertendensi pada pembungkaman orang lain yang tidak mempunyai korelasi dengan pimpinan.

Selain itu, pembentukan modal sosial di SMAN 1 Kalianget juga terbentuk di luar lapangan badminton, yakni di sekolah. Tetapi, pembentukan modal sosial di luar lapangan badminton kurang membentuk modal sosial yang legitimasi dan intim. Mengingat, modal sosial juga mempertimbangkan kelas sosial berdasarkan karakter otonom relasi sosialnya (Bourdieu, 1986: 249). Fakta yang terjadi adalah laki-laki masih mendominasi dalam pembentukan modal sosial di sekolah. Guru perempuan merasakan bahwa dirinya tidak pantas untuk melakukan interaksi dengan laki-laki lain di ruang publik. Guru perempuan hanya melakukan interaksi dengan sekenannya saja, tanpa menghasilkan komunikasi yang mendalam.

Konsekuensi atas pembatasan interaksi guru perempuan dengan kepala sekolah yang notabene laki-laki, berangkat dari prinsip maskulinitas melalui pengontrolan kebebasan perempuan melalui aturan normatif (Bandel, 2016). Berbeda dengan laki-laki yang lebih leluasa melakukan interaksi dengan kepala sekolah tanpa terhambat dengan aturan normatif. Guru laki-laki sebagai agen mampu menagktualisasikan dirinya yang bebas dari regulasi sosial, melalui interaksi dengan kepala sekolah. Bahkan, guru laki-laki sering melakukan sebuah guyonan dan ada beberapa kepala sekolah di SMAN 1 Kalianget yang karakternya bersifat humaris. Maka dari itu, menyebabkan dirinya mudah membentuk jaringan sosial dengan kepala sekolah dan menghasilkan mobilitas sosial. Kondisi serupa terjadi dengan bapak HR dan US yang menurut pengakuan guru-guru di SMAN 1 Kalianget merupakan orang yang sering berinteraksi dan bergurau dengan kepala sekolah. Melalui keakrabannya, membuat dirinya terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Berbeda dengan temuan Ballet, dkk. (2007) network connections, group size; Tohani, dkk., (2016); Nurohmah (2021) yang memperlihatkan jika modal sosial terjalin dengan kondisi yang kaku, formal, dan protokeler, tetapi di SMAN 1 Kalianget justru menggambarkan jika modal sosial di SMAN 1 Kalianget terbentuk lebih lentur, fleksibel, dan santai. Oleh karenanya, meski terdapat guru laki-laki memiliki modal budaya yang mapan, tetapi jika tidak berhasil merangsek ke jaringan sosial yang bersifat luwes dan santai tidak akan memiliki keberartian.

Hal yang menarik justru hadir dari posisi modal simbolik di SMAN 1 Kalianget yang terbentuk melalui relasi keluarga. Meski di SMAN 1 Kalianget memiliki guru dengan akumulasi modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi, tetapi tidak memberikan guru tersebut memiliki nilai prestise. Keluarga menjadi lembaga sosial yang bersifat ambivalensi. Keluarga dapat memberikan dampak positif (Clara & Wardani, 2020), terkadang juga menghasilkan sebuah tragedi. Tragedi keluarga mulai merangsek pada persoalan pendidikan dan gender. Seyogianya, relasi keluarga menjadi modal sosial. Sebab, karakteristik dari modal sosial menghasilkan relasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari setiap individu (Bourdieu, 1977). Bagi Bourdieu modal tidak bersifat tetap, melainkan modal bisa dipertukarkan menjadi akumulasi modal lainnya (Harker, Mahar, & Wilkes, 2009: 17). Karakter modal yang bisa dipertukarkan, menjadikan relasi keluarga sebagai modal sosial ikut menjelma sebagai modal simbolik.

SMAN 1 Kalianget terdapat guru bernama bapak DL yang merupakan guru baru dan terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Bapak DL

merupakan pindahan dari SMA Negeri lain yang berada di Sumenep. Bapak DL pindah ke SMAN 1 Kalianget dengan masa kerja yang terbilang tidak cukup lama jika dibandingkan dengan guru lainnya, yakni satu tahun. Sekalipun demikian, bapak DL mampu menyingkirkan guru senior dan berkompeten lainnya yang ada di SMAN 1 Kalianget. Terlebih lagi bapak DL tidak menduduki struktur wakasek di SMAN 1 Kalianget sebelumnya. Mengingat, terdapat aturan tidak tertulis yang biasa menggunakan wakasek dalam pemilihan guru untuk ikut seleksi calon kepala sekolah. Terjadinya penyingkiran terhadap guru senior lainnya menjadi suatu kritik bagi konsepsi lapangan dari Bourdieu. Konsep lapangan yang dibangun oleh Bourdieu (2020b: 189-190) mendemonstrasikan jika agen akan memenangkan kontestasi di lapangan melalui posisinya yang lama.

Terbentuknya kemenangan bapak DL tidak luput dari posisi kepala sekolah yang memiliki relasi keluarga dengan dirinya. Apabila meninjau kembali, masih banyak guru berkompeten lainnya yang masih layak ikut seleksi calon kepala sekolah. Lantas, apakah tidak ada perlawanan dari guru lainnya akan peristiwa itu? Pertanyaan itu menjadi delik yang sering dipertanyakan kepada beberapa guru. Mayoritas mengatakan bahwa sudah menjadi kewajaran melihat posisi bapak DL memang dekat dengan kepala sekolah. Bapak Rahman dengan kepemilikan modal simboliknya telah membentuk penormalisasian terhadap kesadaran guru di SMAN 1 Kalianget (Bourdieu, 1989). Tetapi, juga terdapat guru yang merasa bahwa pemilihan bapak DL sebagai perwakilan dari SMAN 1 Kalianget untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagai hal yang aneh. Keanehan melihat kompetisi dirinya yang belum sepenuhnya terlihat di mata guru, bahkan menginterpretasikan sebagai bagian dari kongkalikong dinasti keluarga. Sebagaimana skripsi dari Maulidia (2018) temuannya memperlihatkan bahwa ikatan darah menghasilkan status sosial untuk mendapatkan kemenangan. Hanya saja sikap dari guru yang menganggap keanehan, tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti.

Terlepas dari politik keluarga yang terjadi, SMAN 1 Kalianget telah memberikan peluang kepada guru perempuannya untuk menjabat sebagai wakasek dan mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Terdapat dua guru perempuan yang pernah terpilih untuk mengisi struktur wakasek di SMAN 1 Kalianget, yakni ibu Nina dan ibu Dinda (nama samaran). Keduanya terpilih menjadi wakasek berawal dari prestasi dan manajemen kepemimpinannya yang mumpuni. Hingga akhirnya, ibu Dinda juga terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Beragam prestasi dari ibu Dinda berhasil membawa dirinya untuk meningkatkan mobilitas sosialnya.

Namun, perjalanan ibu Dinda untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah sirnah begitu saja. Sebab, suami dari ibu Dinda tidak memberikan izin untuk ikut. Terdapat kebiasaan kultural di SMAN 1 Kalianget bahwa pimpinan meminta setiap guru perempuan agar meminta izin terlebih dahulu kepada suami jika ingin naik jabatan. Penyebab suami ibu Dinda melarang istrinya mengikuti seleksi calon kepala sekolah adalah tidak ingin dirinya meninggalkan peranannya sebagai seorang istri. Sistem sosial yang terjadi pada masyarakat Madura mengagungkan suami sebagai orang utama dalam pengambilan keputusan di keluarga. Berbeda dengan guru laki-laki yang ingin meningkatkan jabatannya, izin dari istri bukan hal yang fundamental. Masyarakat Madura menilai laki-laki sebagai manusia yang mandiri, bijaksana, dan kuat (Rifai, 2007). Penilaian itu menghasilkan pemaknaan di masyarakat, jika laki-laki bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Pemaknaan masyarakat mempengaruhi akan mempengaruhi tindakan dan interpretasi setiap individu (Ritzer & Goodman, 2016). Sehingga, kepala sekolah tidak mewajibkan izin dari istrinya kepada guru laki-laki setiap melantiknya dalam struktur utama di sekolah. Pelarangan ibu Dinda untuk ikut seleksi calon kepala sekolah oleh suaminya dan kebiasaan untuk mewajibkan guru perempuan meminta izin terlebih dahulu pada suaminya, menjadi gambaran terjadinya kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik terjadi secara legitim melalui normalisasi dan tidak menyentuh fisik, sehingga agen tidak sadar telah menjadi objek kekerasan (Bourdieu, 1998: 51).

Akumulasi Modal SMAN 1 Sumenep: Meneguhkan Senioritas

Sekolah seharusnya menjadi ruh penyamarataan tanpa melihat status senioritas. Namun, realitas yang terjadi adalah sistem senioritas masih menjadi fakta sosial yang terus hadir di sekolah. Bertahannya senioritas akibat dari karakter sekolah yang selalu mengulang artefak budaya dominan (Harker, dkk., 2009). SMAN 1 Sumenep menjadi sekolah yang masih mengukuhkan senioritas sebagai modal sosial. Sistem senioritas mengarah pada usia guru dan lamanya menjadi guru di sekolah. Proses pembentukan modal sosial dengan senioritas di SMAN 1 Sumenep berangkat dari reproduksi sistem kepala sekolah terdahulu. Kepala sekolah terdahulu begitu lama menjadi pemimpin, sehingga lebih mendahulukan guru senior untuk menduduki posisi struktur, seperti wakasek. Sistem semacam itu terus mengalami pengulangan oleh kepala sekolah selanjutnya. Tidak mengherankan jika jabatan wakasek selalu mengarah pada guru senior. Tetapi, keberadaan senioritas pada pembentukan modal sosial masih belum menjadi pintu gerbang bagi guru perempuan. Sebab,

guru perempuan di SMAN 1 Sumenep sering mengalami pembatasan interaksi sosial dengan kepala sekolah. Berbeda dengan guru laki-laki, seperti bapak HM yang sudah lama menjabat sebagai wakasek sarpras sering melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Pemilihan bapak HM menjadi wakasek sarpras adalah memiliki jaringan sosial dengan orang birokrasi pendidikan di pusat. Regulasi permendikbud meenjelaskan jika biaya proyek pembangunan sekolah berangkat atas dasar persetujuan Kemendikbud (Kemendikbud, 2021b). Bapak HM yang mempunyai relasi dengan orang birokrasi pendidikan, bagi Bourdieu akan menghasilkan pelembagaan jalinan sosial yang berguna (Riawanti, 2017). Sehingga, menjadikannya lebih mudah untuk mendapatkan proyek pembangunan Selama ini, bantuan pendidikan di Indonesia masih sulit terlepas dengan monopoli pendidikan

Berbeda dengan HD yang menjadi mantan wakasek humas. Bapak HD memiliki kemampuan negosiasi dan etika yang baik saat menghadapi orang lain. Ditambah lagi dengan posisinya yang sudah lama menjabat sebagai guru di SMAN 1 Sumenep. Posisinya yang lama memberikan peluang untuk memahami kondisi sosial dan persoalan yang sering dihadapi oleh sekolah. Alhasil, bapak HD sering menghadapi keberadaan wali murid, media, dan LSM saat datang ke sekolah. Kemampuan tersebut yang menjadikan dirinya dekat dengan kepala sekolah, hingga terpilih menjadi wakasek humas. Melalui kepribadiannya yang baik, HD juga terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Tidak jauh berbeda dengan guru senior laki-laki lainnya yang berhasil merangsek pada pemilihan seleksi kepala sekola berawal dari intensitas komunikasinya dengan kepala sekolah.

Sekalipun, SMAN 1 Sumenep juga terdapat guru perempuan senior, tetapi tidak bisa menghasilkan modal sosial yang mapan hingga terpilih menjadi wakasek atau mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Setidaknya terdapat dua alasan yang menyebabkan guru senior perempuan di SMAN 1 Sumenep tidak berhasil memaksimalkan status seniorinya. Pertama, cara pandang terhadap perempuan yang masih mengalami marginalisasi. Selama ini persepsi budaya maskulinitas masih menjadi penghambat utama perempuan di dunia pendidikan (Baker, 2012). Guru perempuan masih terkonstruksi belum layak menjadi seorang pemimpin. Kedua, terjadi politik ruang. Ruang bukan sekadar benda fisik yang terbentuk dari bahan material. Ruang menjadi tempat terjadinya pengaturan kesadaran melalui regulasi, representasi, dan konstruksi (Bratky, 1990: 64-65). Oleh sebab itu, ruang kepala telah termaknai sebagai bagian dari dimensi laki-laki. Begitu banyak guru laki-laki melakukan diskusi dengan kepala sekolah daripada guru perempuan.

Terjadinya politik ruang yang menyebabkan perempuan menjadi terbatas untuk mengeksplorasi interaksi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah selaku agen sering menginisiasikan suatu diskusi yang berkaitan dengan kebijakan sekolah selalu dengan laki-laki.

Selain itu, politik ruang juga menghasilkan pemisahan antara guru senior dan guru junior di SMAN 1 Sumenep. Kebanyakan, guru junior di SMAN 1 Sumenep lebih memilih ruang perpustakaan, warkop, dan lab komputer. Ketiga ruang tersebut sering menjadi tempat peristirahatan bagi guru junior untuk sekadar bertukar cerita, bercanda, dan makan bersama. Berbanding terbalik dengan guru senior yang selalu berada di ruang guru, bahkan di ruang kepala sekolah. Para wakasek dan operator dapodik sering menggunakan ruang kepala sekolah sebagai ruang pertemuan. Terjadinya pembatasan modal sosial terhadap guru junior akan menyebabkan dirinya kehilangan sumber daya (Bourdieu, 1977: 80). Terjadinya politik ruang yang menyebabkan SMAN 1 Sumenep terus membentuk senioritas sebagai kemapanan.

Namun, kepemimpinan kepala sekolah sekarang mulai terjadi pergeseran untuk menghilangkan senioritas. Teraktualisasikan dalam struktur wakasek di SMAN 1 Sumenep yang mulai bermunculan guru non senior. Sebagaimana bapak Hadi selaku wakasek humas. Bapak Hadi terpilih menjadi wakasek humas atas pertimbangan prestasinya yang mumpuni dan memiliki kemampuan menghadapi elemen masyarakat dengan baik. Sebab, untuk menjadi wakasek humas harus memiliki kemapanan sikap dan komunikasi agar mampu menghadapi elemen masyarakat saat datang ke sekolah. Sekalipun, mulai terjadi transformasi penghapusan senioritas di SMAN 1 Sumenep, nampaknya tidak bisa terjadi secara total. Terbentuknya budaya dominan yang sering terulang atas ruang dan waktu, akan menghasilkan penormalisasian persepsi (Foucault, 2016). Tercerminkan saat terdapat guru junior terpilih memasuki struktural sekolah, dirinya akan merasa ada yang lebih senior dan pantas menjabat.

Dampak lain dari artefak budaya dominan di SMAN 1 Sumenep adalah pengulangan modal budaya yang terobjektifikasikan berupa agama. Secara substansial, guru yang terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah memiliki bekal keagamaan yang kuat. Bapak SL merupakan *kiai kampung* yang aktif mengajarkan ngaji pada anak kecil di sekitar rumahnya. Bahkan, menjadi pengurus anggota NU di Sumenep. Kuatnya posisi keagamaan di SMAN 1 Sumenep juga terasa dari bapak HM yang terlahir dari keluarga kiai di desanya. Sehingga,

sejak kecil telah terbiasa untuk mengenyam pendidikan di lembaga keagamaan. Tidak jauh berbeda dengan bapak SK yang juga terlahir di lingkungan yang kultur agamanya kuat. bapak SK juga memiliki hubungan keluarga dengan tokoh agama yang dituakan oleh masyarakat. Kuatnya kultur keagamaan di SMAN 1 Sumenep tidak menjadi persoalan, selama agama masih menjadi nilai normatif yang memanusiaikan. Tetapi, yang terjadi justru agama telah mengalami politisasi pengetahuan yang melemahkan keberadaan orang lain di era modernitas melalui simbol (Fauzi, 2017). Padahal, simbol menjadi bagian representasi pengetahuan yang tidak terorganisir dari tanda tersampaikan dan disembunyikan (Douglas, 1970). Tidak mengherankan jika terdapat pelemahan peranan perempuan di SMAN 1 Sumenep. Kondisi representasi keagamaan terlihat saat kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sering mengambil suatu kebijakan yang mendistorsikan guru perempuan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan masih sering menyalurkan pengetahuan politisnya untuk melakukan sebuah pendominasian maskulin. Dominasi maskulin memiliki logika pemikiran bahwa perempuan menjadi manusia yang tak berdaya akibat pengaruh spiritual (Bourdieu, 2010), hingga menjadi sebuah ideologi. Padahal, ideologi terikat pada kesadaran palsu tanpa pengetahuan dan kepercayaan yang dianut oleh kelompok dominan (Fiske, 1989).

Dampak dari representasi keagamaan ikut menghasilkan kekerasan simbolik terhadap kepala sekolah. Kepala sekolah di SMAN 1 Sumenep sering merasa kasihan dengan guru perempuan yang rata-rata sudah menikah. Sehingga, guru perempuan harus memiliki tugas lebih selain menjadi guru, juga harus menjadi ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Faktor itu yang menyebabkan kepala sekolah jarang menggunakan guru perempuan dalam jabatan struktural di sekolah. Senyatanya, apabila kepala sekolah mau bersifat objektif, banyak guru perempuan yang mumpuni untuk menjadi kepala sekolah atau struktur lainnya. Sebut saja salah satunya bu Iim, seorang guru berprestasi di Kabupaten Sumenep dan memiliki sederet prestasi. Bu Iim dengan kegigihannya memiliki keinginan untuk terus meningkatkan proposisi jabatannya dalam bidang pendidikan sekolah formal.

Jurang pemisah antara guru senior dengan guru junior, hingga menghasilkan penguatan senioritas di SMAN 1 Sumenep terletak pada pengakumulasian modal yang menghasilkan modal simbolik. Guru yang terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah di SMAN 1 Sumenep mayoritas memiliki prestise dari keberadaan organisasinya, seperti LSM dan organisasi keagamaan. LSM dan

organisasi keagamaan sering kali berubah menjadi wadah yang bersifat instrumental untuk memberikan akses kepada anggotanya untuk mencapai peningkatan sosial (Fakih, 2010, 2011). Lebih menarik hadir dari kepemilikan nilai prestise dari bapak HM yang mempunyai relasi kekerabatan dengan petinggi di Kemendikbud. Tingginya kepemilikan relasi keluarga dengan kemendikbud, ikut meningkatkan modal simbolik dari bapak HM. Selain itu, dampak lain dari relasi bapak HM dengan orang Kemendikbud menyebabkan kepala sekolah menjadi tunduk begitu saja. Kepala sekolah mengakui bahwa dirinya sendiri memilih bapak HM tidak sepenuh hati. Alasan utamanya adalah kinerja dari bapak HM selama menjadi guru di SMAN 1 Sumenep memiliki reputasi yang kurang baik untuk menjadi seorang kepala sekolah. Begitu juga yang dikatakan oleh beberapa teman guru lainnya ikut menilai kalau jiwa kepemimpinan bapak HM tidak layak. Kendati kepala sekolah tidak sepenuh hati memilihnya, akhirnya harus memilihnya akibat modal simbolik yang tinggi dari bapak Kadir melalui ikatan keluarga dengan orang Kemendikbud tadi. Wujud dari modal simbolik memang tidak terlihat, tetapi memiliki dampak yang luar biasa untuk membungkam keberadaan orang lain (Bourdieu, 1977: 192). Kepala sekolah bisa menerima segalanya atas nama kebaikan lembaga. Berbeda dengan guru junior yang sekalipun mempunyai nilai prestise dengan relasi sosialnya, tetapi tidak bisa mengaktualisasikannya karena keterbatasan interaksi dengan kepala sekolah.

Habitus SMAN 1 Kalianget dan SMAN 1 Sumenep

Setiap orang yang masuk dalam sekolah dituntut untuk selalu haus akan ilmu pengetahuan. Ini bertujuan agar terjadi pendidikan seumur hidup dan menerima tuntutan perkembangan zaman. Pada masa kolonial, terdapat pengukuran guru berkualitas melalui keinginannya untuk meningkatkan pengetahuannya melalui membaca, berdiskusi, dan latihan (Lie, dkk., 2008). Konvensi tersebut menghasilkan kebiasaan di sekolah hingga saat ini, bahkan menjadi titik acuan bagi pemilihan calon kepala sekolah.

Secara ekstensif, terdapat perbedaan peningkatan *soft skill* antara guru laki-laki dengan guru perempuan di SMAN 1 Kalianget. Guru perempuan lebih banyak meningkatkan potensi dirinya yang bersifat ekonomi melalui pelatihan di dharma wanita. Dharma wanita memiliki akar sejarah yang panjang dengan perempuan. Pemerintahan Orde Baru menggunakan dharma wanita sebagai organisasi yang menaungi gerakan perempuan dengan memberikan pelatihan

yang bisa meningkatkan sumber daya manusia. Tetapi, inovasi Orde Baru melalui pembentukan dharma wanita juga bertujuan menjatuhkan organisasi perempuan yang radikal (Rumadi & Fathurahman, 2010: 33-34). Pemberian pelatihan oleh dharma wanita terhadap eksistensi perempuan, membentuk habitus melalui pemberian pengetahuan realitas kepada agen (Bourdieu, 1984: 172). Guru perempuan sering mendapatkan pengetahuan dari keaktifan dharma wanita SMAN 1 Kalianget. Berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Kabupaten Sumenep, SMAN 1 Kalianget merupakan sekolah yang dharma wanitanya aktif dan memiliki beragam prestasi. Keaktifan dan prestasi dharma wanita tidak bisa terlepas dari anggota dan pengurusnya. Pengurus dharma wanita SMAN 1 Kalianget berasal dari guru perempuan tanpa melihat status jabatan di sekolah. Selama memiliki kemampuan inovasi dan cekatan akan terpilih menjadi pengurus. Dharma wanita sering memberikan pelatihan yang berorientasi pada ekonomi, keagamaan, memasak, dan membuat kerajinan.

Sekalipun demikian, juga terdapat guru perempuan yang mengembangkan potensi dirinya di lembaga pendidikan dan pelatihan. Semisal, ibu Diska yang mengikuti pelatihan keguruan dan mengikuti tahapan guru penggerak. Ibu Farida, Ibu Martinah, dan Ibu Endra yang juga mengikuti berbagai *workshop* oleh berbagai instansi. Tetapi, sebagaimana di awal bahwa keikutsertaan guru perempuan mengikuti diklat dan *workshop* minim, karena terbentur oleh beban ganda antara tugas sekolah dan tugas rumah.

Berbeda dengan guru laki-laki di SMAN 1 Kalianget yang meningkatkan potensi diri melalui pelatihan formal dengan melanjutkan studi magister, *workshop*, dan diklat. Terdapat tujuh guru laki-laki yang telah menuntaskan studi magisternya. Rata-rata menempuh pendidikannya di kampus luar Madura. Bahkan, bapak ADM berhasil menyelesaikan studi magister pendidikannya di kampus luar negeri. Banyaknya guru yang berasal dari lulusan kampus luar Madura akibat dari konsep kehidupan masyarakat Madura. Masyarakat Madura memiliki kebiasaan agar anak laki-laknya *ngonggeh* (merantau) ke luar Madura untuk meningkatkan pengalaman dan mendidiknya agar tidak mudah menyerah (*ta' birnyeh*) (Rifai, 2007). Bourdieu menyebutnya sebagai habitus khas, karena berangkat dari pengalaman dan sosialisasi yang sifatnya unik (Ritzer & Goodman, 2016). Sehingga, tidak mengherankan jika bapak TH sudah merasakan asam pahitnya berbagai persoalan pendidikan saat dirinya pernah menjadi guru di Timor-Timor saat Orde Baru. Ditambah lagi dengan pengalamannya di dunia pendidikan selama berkuliah.

Peningkatan potensi diri guru laki-laki di SMAN 1 Kalianget juga berasal dari keikutsertaannya di pelatihan dan *workshop* oleh berbagai instansi, paling sering kementerian pendidikan. Pelatihan yang ada menjadikan wawasannya semakin luas menyikap permasalahan pendidikan, pengembangan jiwa kepemimpinan, inovasi dan pengembangan sekolah, dan sebagainya. Berbagai guru yang terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah berasal dari individu yang aktif terlibat kegiatan pelatihan dan *workshop*. Keaktifan ini berasal dari modal sosial dengan kepala sekolah. Mengingat, kepala sekolah merupakan orang yang bertugas untuk menunjuk guru setiap ada kegiatan pelatihan dan *workshop*. Sehingga, guru yang tidak memiliki kedekatan dengan kepala sekolah, maka kesempatannya untuk mengikuti pelatihan dan *workshop* semakin sempit.

Kuatnya pengaruh modal sosial terhadap penunjang status di sekolah SMAN 1 Kalianget, membawa guru memiliki kebiasaan untuk bermain badminton. Badminton bukan sekadar olahraga, melainkan menjelma sebagai ruptur korelatif dengan konstitusi lapangan yang menghasilkan praktik spesifik (Bourdieu, 2020: 294). Artinya, badminton di SMAN 1 Kalianget menjadi permainan kultural yang memperantarai agen dengan realitas sosial. Sebab, badminton adalah bagian dari medium pembentukan modal sosial di SMAN 1 Kalianget. Oleh sebab itu, kerangka tindakan guru SMAN 1 Kalianget “terjerembab” ke permainan badminton sebagai bagian dari produk kultural. Terlebih lagi habitus dominan dapat mempengaruhi agen, sesuai temuan Martono, dkk., (2019) bahwa kelompok subordinat akan mengikuti habitus kelompok dominan di sekolah. Terdapat dua jenis guru selaku agen dalam permainan badminton. Pertama, guru yang sudah memiliki keahlian bermain badminton. Keahlian bermain badminton didapatkan dari kebiasaannya sebelum menjadi guru melalui klub badminton atau masuk jurusan olahraga di perguruan tinggi. Guru jenis ini tidak akan mengalami kesulitan saat bergabung dengan PB Kaliber. Kedua, guru belum memiliki keahlian. Guru jenis ini mengalami kesulitan saat bergabung dengan PB Kaliber. Tetapi, kemampuannya untuk bermain akan terus meningkat selama aktif bermain di PB. Kaliber. Beberapa guru yang mulanya tidak senang bermain badminton, lambat laun menyukai badminton sebagai bagian dari olahraga dan tujuan politis yang tidak nampak. Bourdieu (1979:3) menyatakan bahwa habitus akan semakin menubuh ketika sering melakukan interaksi dengan orang sekitar yang memiliki habitus sama.

Tidak jauh berbeda dengan SMAN 1 Sumenep yang juga terdapat dharma wanita sebagai organisasi untuk pengembangan kualitas guru perempuan. Kemudian,

berbanding terbalik dengan SMAN 1 Kalianget, guru laki-laki dan guru perempuan SMAN 1 Sumenep lebih banyak yang telah menyelesaikan studi magisternya. Banyaknya jumlah guru yang bergelar magister di SMAN 1 Sumenep berangkat dari struktur simbol SMAN 1 Sumenep sebagai sekolah yang pernah menyanggah RSBI. Sekolah RSBI membentuk penafsiran sebagai sekolah yang memiliki standar pendidikan tinggi dengan sumber daya manusianya yang berkualitas (Artini, 2011). Penafsiran tersebut membuat guru di SMAN 1 Sumenep tergerak hatinya untuk melanjutkan pendidikan magister. Meskipun status RSBI telah dihapus oleh MK lantaran menghasilkan ketimpangan pendidikan (Qodir, 2013), namun telah terjadi ketidaksadaran kultural bahwa sekolah magister menjadi acuan standar kualitas di SMAN 1 Sumenep. Hal ini dampak dari habitus yang membentuk skema konseptual dari realitas sosial berdasarkan ruang dan waktu, seperti konsep kesuksesan berasal dari sekolah formal (Harker et al., 2009: xviii). Esensi dari RSBI akhirnya membentuk konsep pemikiran guru perempuan untuk meningkatkan jenjang pendidikannya melalui peningkatan kualitas diri. Tercerminkan dari bu Iim yang saat ini menempuh magister di Unesa. Dirinya menempuh magister bertujuan untuk mengembangkan minatnya di bidang pendidikan.

Meski demikian, tidak semua guru di SMAN 1 Sumenep menganggap jika gelar magister merupakan indikator kualitas, mutu, dan bobot. Terbentuk perbedaan antara guru kritis dan guru birokratis. Guru kritis merupakan individu yang memiliki kesadaran kritis. Meminjam konsep kesadaran dari Freire (2019) bahwa kesadaran kritis sebagai individu yang memiliki pandangan bahwa ada ketidakberesan terhadap kemapanan di kehidupan sosial. Guru kritis menganggap jika gelar magister tidak lebih dari ideologi politik yang menghasilkan ketimpangan. Kesadaran kritis guru SMAN 1 Sumenep mulai terbentuk sejak berada di dunia kampus dan aktif di organisasi. Bapak Hairil merupakan mahasiswa yang telah lama bergelut dengan dunia literasi, penelitian, dan jurnalis selama berkuliah. Sehingga, menghasilkan identitas kritis. Berbeda dengan guru birokrat yang menganggap bahwa gelar magister menjadi penunjang untuk mobilitas sosial di sekolah. Bahkan, beberapa guru yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah di SMAN 1 Sumenep berdasarkan tujuan instrumental ekonomi, bukan untuk mendedikasikan dirinya untuk kemajuan pendidikan.

Perbedaan lainnya hadir dari hubungan pertemanan di SMAN 1 Sumenep yang terbagi berdasarkan kelompok. Pertemanan berdasarkan kelompok berdasarkan kesamaan kesenangan dan kepribadian. Akibatnya, guru SMAN 1

Sumenep tidak memiliki solidaritas yang mapan daripada guru SMAN 1 Kalianget. Bentuk pertemanan tersebut merupakan aktualisasi hasil disposisi berdasarkan pengalaman dari lingkungan sosialnya yang telah lama terbentuk (Chopra, 2003). Pertemanan berdasarkan kelompok terus tersalurkan setiap kali ada guru baru yang memasuki SMAN 1 Sumenep. Dampaknya, setiap guru memiliki ruangan masing-masing untuk berkumpul berdasarkan kelompoknya. Kondisi itu membuat setiap ruangan di SMAN 1 Sumenep telah tersekat sesuai kelompok yang ada. Bahkan, saat melakukan darma wisata, keadaan pertemanan kelompok juga terasa ketika saat di tempat wisata membaaur dengan kelompoknya masing-masing. Meskipun, kepala sekolah sekarang terus membenahi terjadinya pertemanan yang berkelompok demi mencapai lingkungan sekolah yang lebih solid, tetapi memerlukan waktu yang lama. Sebab, sudah menjadi ingatan sosial melalui penanaman jasmani dan psikis individu.

Habitus, Modal, dan Arena: Reproduksi Patriarki

Subjektifitas yang tertanam dalam diri agen akan menghasilkan realitas berdasarkan struktur objektif melalui kepemilikan modal dalam arena. Bourdieu (1977) memaparkan bahwa arena menjadi ruang pertukaran antara habitus dan modal untuk membentuk tindakan sosial. Secara kritis, terjadi perbedaan habitus peningkatan potensi diri antara guru laki-laki dan perempuan di SMAN 1 Kalianget. Guru perempuan lebih mengarahkan pengembangan dirinya di dharma wanita. Persoalan hadir tatkala pengembangan di dharma wanita masih terperangkap terhadap ideologi patriarki, karena berorientasi pada masalah keluarga. Tercerminkan dari kegiatan dharma wanita yang berorientasi terhadap ekonomi, yakni mengelolah kerajinan, memasak, dan agama. Pelatihan tersebut menjadi pengulangan konsep dharma wanita yang terbentuk saat masa Orde Baru yang bertujuan untuk menjadi inisiator kesejahteraan keluarga (Rumadi & Fathurahman, 2010). Pelatihan ekonomi, memasak, agama, dan pembuatan kerajinan bukan menjadi instrumen yang menunjang guru perempuan memasuki dunia kepala sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2017, kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial, supervisi, dan jiwa kepemimpinan. Tiga kemampuan itu tidak tersalurkan dalam dharma wanita, melainkan lebih sering terbentuk melalui diklat atau *workshop* yang diselenggarakan oleh beragam instansi. Sayangnya, guru perempuan tidak memiliki motivasi lebih mengikuti acara tersebut, lantaran terbentur dengan beban ganda antara tugas rumah dan tugas sekolah.

Terbentuknya beban ganda terjadi akibat kultur matrilineal pada keluarga di Madura. Matrilineal di Madura bersifat ambivalensi, di satu sisi menguntungkan perempuan dan di sisi lain menjadi bagian dari patriarki yang melemahkan perempuan (Hefni, 2012) pola menetap setelah kawin (post-marital residence). Kultur matrilineal masih sering menjadi praktik di Madura hingga sekarang, terutama di daerah pedesaan (Noer, 2021). Guru SMAN 1 Kalianget yang mayoritas berasal dari desa mengukuhkan nilai matrilineal. Selain itu, keberadaan dharma wanita tidak bisa menjadi inisiator pembentukan modal sosial yang berguna untuk terpilih mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Anggota dan pengurus dharma wanita sekadar membangun relasi dengan istri kepala sekolah. Sebab, modal sosial lebih bersifat absolut apabila bersifat terlembaga dan diakui dengan individu yang memiliki otoritas di lingkungan sosialnya (Bourdieu, 2020b). Dalam pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, individu yang memiliki otoritas ialah kepala sekolah.

Modal sosial menjadi modal yang paling berharga di sekolah. Alasannya, individu dapat menerima informasi yang berkaitan dengan agenda pendidikan. Dalam hal ini, guru perempuan tidak dapat membangun modal sosial karena tidak memiliki yang terbangun di arena badminton. Minimnya akses guru perempuan di arena badminton berangkat dari representasi gender, sekaligus regulasi normatif yang terbentuk di PB Kaliber melalui keengganan menerima perempuan untuk bermain badminton. Berbeda dengan guru laki-laki, seperti bapak SN, TH, dan AS yang sukses menjadikan arena badminton sebagai ruang membangun modal sosial dengan kepala sekolah terdahulu. Arena badminton pada akhirnya melampaui permainan fisik, menjadi ruang yang berguna untuk mobilitas sosial.

Begitu juga di arena sekolah, guru perempuan juga mengalami kekalahan akibat minimnya akses untuk berinteraksi dengan kepala sekolah. Guru laki-laki lebih memenangkan akses berinteraksi dengan kepala sekolah saat di sekolah. Guru laki-laki yang sering membangun keintiman dengan kepala sekolah, akhirnya juga sukses membangun modal sosial, seperti bapak HR dan US. Modal sosial yang terbangun berguna bagi mereka untuk sering terlibat dengan kepala sekolah untuk membuat kebijakan. Terlebih lagi bermanfaat karena sering menjadi prioritas membangun modal budaya melalui *workshop* dan diklat. Selain itu, masih banyak lagi guru laki-laki yang berhasil membangun modal sosial dengan kepala sekolah sering menjadi prioritas untuk mengikuti diklat dan *workshop*.

Diklat dan *workshop* merupakan serangkaian acara *upgrading* diri bagi guru melalui sosialisasi materi. Materi yang sering tersosialisasikan mengarah tentang penyelesaian pendidikan, pengembangan sekolah, dan kepemimpinan. Beragam materi itu merupakan pengetahuan yang berharga untuk pengembangan karir guru di sekolah, bahkan bertendensi pada kompetensi kepala sekolah. Guru yang memiliki modal budaya dari hasil *workshop* dan diklat dapat mengaktualisasikannya di arena rapat. Rapat menjadi ruang publik karena bagi Habermas (1991) ruang publik terbentuk saat terjadi pertukaran gagasan secara dialogis. Selain menjadi ruang publik, rapat juga menjadi arena yang mengkerdilkan posisi perempuan. Sebab, rapat menjelama sebagai arena kultural untuk mengaktualisasikan modal budaya yang notabene lebih terlembagakan pada habitus guru laki-laki. Disertasi Hefni (2019) menunjukkan jika modal budaya menjadi modal yang berharga di arena kultural. Data lapangan menunjukkan jika guru yang terpilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah sering mengaktualisasikan modal budaya berupa kompetisinya melalui rapat. Bapak HR, SN, TH, AS, dan US saat kondisi rapat sering bertukar gagasan dan argumen. Tidak jarang juga sering melakukan kritik terhadap kebijakan kepala sekolah yang dianggap kurang baik. Berbanding tebalik dengan guru perempuan yang hanya sebagian kecil mengaktualisasikan modal budayanya. Meski sebagian guru perempuan di SMAN 1 Kalianget tidak aktif mengikuti diklat atau *workshop* akibat beban ganda, tetapi juga terdapat sebagian yang juga aktif di acara tersebut. Alhasil, guru perempuan yang coba terlibat di dua kegiatan tersebut juga memiliki modal budaya yang berdampak pada terpilihnya menjadi wakasek, seperti ibu Dinda dan ibu Nina. Bahkan, ibu Dinda mampu mempertukarkan modal budayanya juga dengan aktif berargumen sampai rapat, hingga sempat dicalonkan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah meski terhambat izin keluarga.

Peristiwa yang menarik justru hadir di kepemimpinan sekarang yang memilih guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah berdasarkan nilai prestise. Mengingat, kepala sekolah terdahulu mencalonkan guru untuk seleksi calon kepala sekolah berdasarkan kualitas dan kompetisi yang ternilai berdasarkan intensitas waktu. Kepemimpinan sekarang mengubahnya melalui kepemilikan prestise berdasarkan hubungan keluarga. Artinya, arena rumah mulai merangsek dalam arena pertarungan pemilihan guru untuk seleksi calon kepala sekolah di SMAN 1 Kalianget. Meminjam temuan dari Noer (2021) bahwa rumah di Madura sudah sejak lama menjadi ruang yang penuh dengan politik ruang, sekaligus sering terlupakan oleh masyarakat. Bapak DL memanfaatkan relasi keluarganya untuk

membangun identitas diri dengan kepala sekolah (selaku keluarga) untuk terpilih mengikuti seleksi calon kepala sekolah.

Subjektifitas habitus dan modal yang berada di SMAN 1 Sumenep memang memiliki perbedaan dengan SMAN 1 Sumenep, tetapi juga memiliki kemiripan. Perbedaan yang terlihat dari pengembangan potensi diri antara guru laki-laki dan guru perempuan secara akademis. Akses guru perempuan untuk mengikuti diklat, studi banding, dan *workshop* juga tersedia, meski guru laki-laki yang masih mendominasi. Tetapi, limitasi keseimbangan antara guru laki-laki dan guru perempuan tentang pengembangan kompetensi guru bersifat paradoks. Konteks modal budaya di SMAN 1 Sumenep yang bersifat internalisasi melalui agama ikut mempengaruhi. Karakter masyarakat Sumenep tidak jauh berbeda dengan masyarakat Madura, yakni mengagungi agama sebagai nilai utama (Kuntowijoyo, 2017). Pengagungan nilai agama terus terjadi melalui peranan keluarga mendidik anaknya. Data observasi dan wawancara memperlihatkan jika terdapat 3 guru yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah hidup di keluarga agama yang kental, yakni bapak SK, SL, dan HM. Bapak SL hidup dan besar di tengah keluarga agama pengurus NU. Sehingga, menjadi wajar jika dirinya masih aktif dalam organisasi NU. Bapak SK dan HM juga hidup dari keluarga *kiai*. Bahkan, ayah dari bapak HM merupakan tokoh agama yang memiliki otoritas di masyarakat. Pengaruh pembentukan agama melalui keluarga sejak kecil mempengaruhi struktur identitas baginya. Beberapa guru lainnya juga memiliki identitas keagamaan yang mengakar kuat.

Dominannya identitas agama menjadi konsekuensial akibat terbentuknya penyingkiran perempuan melalui penafsiran agama. Ayat yang sering digunakan untuk memperkuat wacana tersebut adalah surah An-Nisa ayat 34 yang artinya “ Para lelaki adalah sebagai pemimpin bagi para perempuan” (Amin, 2019). Melalui ayat tersebut terbentuk sebuah penormalisasian yang menggambarkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin, karena yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki. Hadirnya modal budaya berupa agama di SMAN 1 Sumenep dapat teraktualisasikan melalui modal sosial berupa senioritas melalui arena rapat. Bapak SK, SL, dan HM merupakan guru senior yang telah lama mengajar di SMAN 1 Sumenep. Melalui senioritasnya dirinya mampu menyalurkan modal budayanya untuk memperteguh kemapanan laki-laki dan agama. Apersepsi yang tahan lama terjadi melalui kerja konstruksi diakritis, lalu menghasilkan habitus viril antara maskulin dan feminim (Bourdieu, 2010: 32-33). Habitus viril membentuk pelembagaan yang memisahkan kerja perempuan dan laki-laki dengan ritus-ritus yang terlembagakan di masyarakat.

Selanjutnya, terjadinya politik ruang mengakibatkan guru perempuan tidak maksimal menampakkan kompetisinya. Politik ruang telah menghasilkan pembatasan akses interaksi antara guru perempuan dan guru laki-laki dengan kepala sekolah. Ditambah lagi dengan terbentuknya kelompok pertemanan, semakin melemahkan guru perempuan dan guru senior. Sebab, kelompok pertemanan antara guru laki-laki yang senior lebih berteman dengan laki-laki yang senior. Hal ini yang menyebabkan guru perempuan tidak berhasil mengoptimalkan kompetisinya dengan baik, sekalipun guru senior. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki kemampuan modal sosial sukses menjadi arena ruang kepala sekolah dan arena rapat untuk mengaktualisasikan kemampuan potensinya. Seperti, bapak HD yang memiliki kompetensi etika dan komunikasi yang baik selama menerima atau mendampingi tamu ketika bertemu dengan kepala sekolah. Bapak SK, SY, SL, MO, HM, dan AC juga mengemukakan pendapatnya saat rapat besar atau sekadar rapat dengan kepala sekolah, sehingga mampu memberikan kesan pada kepala sekolah. Secara akumulatif, penggunaan modal yang paling menonjol terbentuk dari bapak HM. Bapak HM bukan hanya menggunakan akumulasi modalnya di arena sekolah, melainkan juga di arena keluarga. Penggunaan arena keluarga terjadi saat berada di rumah ketika silaturahmi sesama keluarga atau saat keluarganya yang berasal dari pejabat Kemendikbud *toron* ke Sumenep. Tindakan bapak HM semakin mengukuhkan posisi modal simboliknya

Agen dengan pelbagai habitusnya menghasilkan sebuah disposisi yang terkorelasikan dengan arena. Habitus dan arena menjadi dimensi yang tidak bisa terpisahkan. Habitus menjadi struktur pengetahuan yang mengalami restrukturasi dengan mempengaruhi tindakan, sedangkan arena menjadi ruang agen untuk bertindak memperebutkan sumber daya atau akses kekuasaan (Ritzer & Goodman, 2016). Tidak bisa terbantahkan bahwa habitus dan arena merupakan konsekuensial dalam menghasilkan reproduksi patriarki di SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget melalui kepemilikan modalnya. Arena yang dipergunakan untuk mereproduksi patriarki di SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget terjadi di arena pendidikan. Meski demikian, arena pendidikan juga bersingungan dengan arena kultural. Pilegge dan Patton (2003) menjelaskan bahwa arena dapat mengalami komperasi dengan arena lainnya berdasarkan persoalan yang kompleks. Kemudian, terjadinya ideologi patriarki di SMAN 1 Kalianget yang terselip melalui nilai matrilineal telah menjadi ketidaksadaran kultural yang melemahkan perempuan. Ditambah lagi dengan akumulasi modal lebih dimenangkan oleh guru laki-laki

daripada guru perempuan, akhirnya semakin mengukuhkan reproduksi patriarki pada arena pendidikan. Guru perempuan telah mengalami kekalahan disposisi. Kekalahan disposisi terlihat saat pengambilan kebijakan, kepala sekolah selalu melakukan diskusi dengan wakaseknya. Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap ada rapat kecil untuk mengambil keputusan sekolah yang konsekuensial, kepala sekolah lebih mengedepankan wakasek.

Data wawancara ikut menunjukkan terjadi persepsi kepada wakasek dan kepala sekolah SMAN 1 Sumenep untuk menormalisasikan bahwa guru perempuan tidak bisa menjadi pemimpinan lantaran koadratnya. Persepsi tersebut ikut diperkuat dengan kehadiran salah satu wakasek yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang di Kemendikbud. Relasi keluarganya dan senioritasnya menghasilkan kuasa prestise yang digunakannya untuk mengontrol kesadaran kepala sekolah saat pemilihan wakasek sesuai habitus berdasarkan skema-skema dominan yang diperolehnya dari agama fundamental di madrasah. Begitu juga dengan di SMAN 1 Kalianget meski terdapat guru perempuan yang mampu merangsek ke struktur wakasek, tetapi posisinya tidak begitu berarti. Sebab, sekolah sebagai ruang perjumpaan beragam agen, hanya akan mereproduksi budaya dominan (Bourdieu, 1973). Kelas dominan di arena pendidikan di SMAN 1 Kalianget masih mengagungkan guru laki-laki dan melemahkan posisi perempuan. Arena pendidikan yang terkorelasikan dengan arena budaya di SMAN 1 Kalianget dan SMAN 1 Sumenep serupa dengan temuan Martono, dkk. (2019) yang memperlihatkan reproduksi gaya hidup kelas atas terhadap kelas bawah di sekolah inklusi terus terjadi melalui struktur yang terstrukturasi, sehingga menghasilkan kelas ter subordinasi dan kelas dominan di sekolah. Oleh sebab itu reproduksi patriarki dalam pemilihan calon kepala sekolah di SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget akan terus terjadi melalui kekalahan guru perempuan dalam arena pertarungan akibat habitus dan lemahnya kepemilikan modal. Hal ini menghasilkan praktik yang dominan bagi laki-laki dan terdominasi bagi guru perempuan.

Simpulan

Dominasi laki-laki sebagai kepala sekolah di SMAN Sumenep berangkat dari minimnya akses guru perempuan untuk dipilih mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Guru perempuan tidak memiliki modal yang mapan daripada guru laki-laki. Modal bagi Bourdieu memiliki konsekuensial berarti terhadap suatu arena perebutan kuasa. Modal yang terbentuk di SMAN 1 Kalianget dengan

SMAN 1 Sumenep memiliki perbedaan, sekaligus juga memiliki persamaan. Hal ini sekaligus mengembangkan kajian sosiologi olahraga tentang gender dan pendidikan di sekolah. Modal sosial guru laki-laki di SMAN 1 Kalianget terbentuk melalui lapangan badminton. Berbeda dengan modal sosial di SMAN 1 Sumenep yang terbentuk melalui seniotitas. Perbedaan juga terjadi pada modal budaya di SMAN 1 Kalianget menggunakan modal budaya yang terlembagakan melalui gelar dan sertifikat akademik. Menariknya, di SMAN 1 Sumenep yang notabene gurunya berasal dari kota justru mengedepankan pengetahuan yang terobjektifikasikan berupa pengetahuan agama. Terjadinya perbedaan modal sosial dan modal budaya, guru laki-laki di SMAN 1 Sumenep maupun di SMAN 1 Kalianget sama-sama tidak menggunakan modal ekonomi secara maksimal untuk ditukarkan sebagai media terpilihnya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Hal ini memberikan peninjauan ulang perihal konsep modal ekonomi Bourdieu yang menurutnya fleksibel, esensial, dan mudah dipertukarkan dengan arena lainnya. Lebih menegangkan adalah relasi keluarga menjadi modal simbolik. Perbedaannya modal simbolik melalui relasi keluarga berjalan dengan mulus di SMAN 1 Kalianget, sedangkan di SMAN 1 Sumenep justru kepala sekolahnya mengalami kekerasan simbolik.

Berbagai akumulasi modal yang dimiliki oleh guru laki-laki di SMAN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget dipertaruhkan di sebuah arena. Arena menurut Bourdieu tidak bisa terpisahkan dengan habitus, sekaligus menjadi ruang untuk mempertaruhkan modal yang dipunyai oleh agen untuk memperoleh sebuah akses. Habitus yang terstrukturasi terbentuk melalui representasi agama dan matrilineal yang berkelindan dengan ideologi patriarki. Dalam penelitian ini, pertarungan antara habitus dan modal secara substansial terjadi di arena pendidikan dan budaya. Arena budaya yang mengedepankan modal budaya menyatu dengan modal sosial, dan modal simbolik sebagai modal utama di arena pendidikan. Guru laki-laki mengaktualisasikan modalnya agar memperoleh akses untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Sehingga, guru perempuan dengan posisinya yang tersubordinasi di arena tidak bisa melakukan suatu perlawanan maupun negosiasi menghadapi dominasi guru laki-laki. Oleh sebab itu, reproduksi patriarki akan terus menjadi praktik dalam pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, sehingga guru perempuan selalu mengalami ketertindasan, penyingkiran, dan pelemahan.

Daftar Pustaka

- Abduh, I. (2020). Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola Dalam Perspektif Sosiologi Olahraga. *Jurnal Penjaskesrek*, 7(2), 289–300.
- Airin, R. (2010). Influencing factors of female underrepresentation as school principals in Indonesia. *ERIC Institute of Education Sciences*, 10(2), 1–15. Retrieved from <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536707.pdf>
- Amin, M. (2019). Analisis Gender: Mengkaji Kembali Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-FURQAN: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, VIII(1), 15–22.
- Arif, M., Sulthon, A., Munfarida, A., Sumardi, E., Qudsiyah, F., Misnatun, & Muchlisson, M. (2020). *Pendidikan Postmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan* (kedua; R. KR, ed.). Sleman: Ar-Ruzz Media.
- Arsendy, S., Sukoco, G. A., & Purba, R. E. (2020). Kepala sekolah perempuan di Indonesia: saat ini masih sedikit dan kita butuh lebih banyak. Retrieved March 18, 2021, from Conversation website: <https://theconversation.com/kepala-sekolah-perempuan-di-indonesia-saat-ini-masih-sedikit-dan-kita-butuh-lebih-banyak-137622>
- Artini, L. P. (2011). Persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan bahasa Inggris di kelas bilingual di sekolah menengah atas berstatus RSBI di Bali. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(4), 307–312. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/viewArticle/2733>
- Badrus, & Wahyuni, L. S. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan Lembaga Pendidikan Islam Dasar Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.974>
- Baker, M. (2012). *Academic Careers and the Gender Gap*. Toronto: UBC Press.
- Ballet, J., Sirven, N., & Requier-Desjardins, M. (2007). Social capital and natural resource management: A critical perspective. *Journal of Environment and Development*, 16(4), 355–374. <https://doi.org/10.1177/1070496507310740>
- Bandel, K. (2016). *Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Bernal, C., Monosov, N., Stencler, A., Lajoie, A., Raigoza, A., & Akhavan, N. (2017). Gender Bias within the Superintendentcy: A Comparative Study. *Journal of School Administration Research and Development*, 2(1), 42–52.

- Retrieved from http://ezproxy.fiu.edu/login?url=https://search.proquest.com/docview/200955531?accountid=10901%0Ahttp://resolver.ebscohost.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft_id=info:sid/ProQ%3Aeric&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft
- Bourdieu, P. (1973). *Cultural Reproduction and Social Reproduction in: : Knowledge, Education, and Cultural Change*. London: Tavistock.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1979). *Algeria*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. Greenwood: CT.
- Bourdieu, P. (1988). *Homo Academicus*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. *Sociological Theory*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.2307/202060>
- Bourdieu, P. (1998). *Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market*. New York: The New Publisher.
- Bourdieu, P. (2010). *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, P. (2020a). *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*. Yogyakarta: IRCiS0D.
- Bourdieu, P. (2020b). *Pertanyaan-Pertanyaan Sosiologi* (Pertama; T. Setiadi, Ed.). Yogyakarta: IRCiS0D.
- Bourdieu, P., Wacquant, L. D., & Farage, S. (1994). Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. *Sociological Theory*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.7591/9781501717789-004>
- Bratky, S. L. (1990). *Femininity and Domination: Studies in The Phenomenology of Oppression*. New York: Routledge.
- Chopra, R. (2003). Neoliberalism as Doxa: Bourdieu's Theory Of State And The Contemporary Indian Discourse On Globalization And Liberalization. *Cultural Studies*, 18(1), 426.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Costelloe, T. . (1996). Between the Subject and Sociology: Alferd Schutz's Phenomenology of the Life-World. *Human Studies*, 19(3).

- Douglas, M. (1970). *Natural Symbol*. London: Penguin Books.
- Durkheim, E. (1984). *The Division of Labor on Society*. New York: The Free Press.
- Dzuhayatin, S. R., & Edwards, J. (2010). Hitting our Heads on the Glass Ceiling: Women and Leadership in Education in Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 17(2), 199–232.
- Fakih, M. (2010). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: insist Press.
- Fakih, M. (2011). *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Kedua; E. Prasetyo & F. Agustina, Eds.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. M. (2017). *Sosiologi Agama*. Surabaya: Unesa University Press.
- Fiske, J. (1989). *Reading the Popular*. London: Routledge.
- Foucault, M. (2016). *Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern* (kedua). Yogyakarta: LKis.
- Freire, P. (2007). *Politik Pendidikan* (Mas'ud, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, P. (2019). *Pendidikan Kaum Tertindas* (Pertama). Yogyakarta: Narasi.
- Gaus, N. (2011). Women and School Leaderships: Factors Deterring Female Teachers from Holding Principal Positions at Elementary Schools in Makassar. *Advancing Women in Leadership*, 31(2), 175–188.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: The MIT Press.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009a). *(Habitus x Modal)+ Ranah= Praktik* (2nd ed.; S. Rahmana, Ed.). Yogyakarta: Jalasutra.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009b). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik* (Kedua). Yogyakarta: Jalasutra.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Rezim Kritis Post-Strukturalis* (Widiantoro, Ed.). sleman: PT Kansius.
- Hefni, M. (2012). Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat. *Karsa*, 20(2), 212–227.
- Hefni, M. (2019). *Islam Madura: Sebuah Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep Madura* (Pertama; R. Zaiful & T. Subakti, Eds.). Batu: Literasi Nusantara.
- Jatiningsih, O. (2016). Glass Ceiling Dalam Karier Kepemimpinan Perempuan Di Sekolah. In T. H. Rahmad, S. Hadiwiobo, M. H. Widjanarko, & L. O. Wahyudi

- (Eds.), *Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III* (pp. 235–240). Bangkalan: Puslit Gender Dan Budaya Madura LPPM UTM.
- Jaya, I. M. L. M. (2020a). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Jaya, I. M. L. M. (2020b). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Kemendikbud. (2021a). *Data Guru Kabupaten Sumenep*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Kemendikbud. (2021b, August 31). Prioritas Dana Alokasi Khusus 2022: Pemenuhan Sarana TIK dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Kuntowijoyo. (2017). *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kushendra, L. (2021). *Islam Dan Gender Pada Cabang Olahraga Futsal Perempuan Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kusi, H. (2019). Factors Responsible For the Under-Representation of Women in Senior High School Headship in the Brong Ahafo Region, Ghana. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6(1), 537–549. <https://doi.org/10.33422/icetl.2018.11.80>
- Lie, A., Sayoga, J. T. T., Parera, F., Josfoef, D., S.J, P. S., Tilaar, H. A. ., ... Widiyanto, P. T. (2008). *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Universintas Sanata Dharma.
- Martono, N., Mintarti, Elis, P., & Dadan, S. (2019). Sekolah Inklusi Sebagai Arena Kekerasan Simbolik. *Sosiohumaniora*, 21(2), 150–158. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.18557>
- Maulana, M. F. (2021). Meme and cyber sexism: Habitus and symbolic violence of patriarchy on the Internet. *Simulacra*, 4(2), 215–228. <https://doi.org/10.21107/sml.v4i2.11899>
- Maulidia, H. (2018). Kapital Simbolik Sebagai Identitas Keluarga Besar Studi Kasus Komunitas Bani Ma ' shum di Kecamatan Jatibarang Brebes Jawa Tengah. *Jurnal Empirika*, 3(2), 121–138.
- Media Kepala Sekolah. (2020). Bagaimana Mekanisme Proses Pengusulan Calon Kepala Sekolah?

- Mulawarman, W. G. (2015). Female Teachers Holding the Position of Principal (Case Study of Females in Pursuing Career in School). *American Journal of Educational Research*, 3(3), 282–287. <https://doi.org/10.12691/education-3-3-5>
- Mythili, N. (2017). *Representation of Women in School Leadership Positions in India* (National University). Retrieved from [https://www.edcentrum.org/pdf/higher-education/8_Representation of Women in School Leadership positions in India.pdf](https://www.edcentrum.org/pdf/higher-education/8_Representation%20of%20Women%20in%20School%20Leadership%20positions%20in%20India.pdf)
- Noer, K. U. (2021). *Menolak (di)lupa(kan): Politik Tubuh dan Kuasa Tanean dalam Bingkai Kultural Madura*. Jakarta: Perwatt.
- Novarisa, G. (2019). Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 195. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i02.1888>
- Nurdiana, Y., & Andriany, D. (2013). Peran Tayangan Sinetron “Tendangan Si Madun” Pada Minat Olahraga Sepak Bola Anak-Anak. *Jurnal Signal*, 1(1), 1–11.
- Nurohmah, M., Subiyantoro, H., & Suja'i, I. S. (2021). Peran Modal Sosial Dalam Pendidikan Pesantren Di Era Society 5.0. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 9(2), 133–141.
- Pileggi, M. S., & Patton, C. (2003). Introduction: Bourdieu and Cultural Studies. *Cultural Studies*, 7.
- Prastiwi, I. L. R., & Rahmadanik, D. (2020). Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia. *Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 1–11. Retrieved from didarhma@untag-sby.ac.id
- Prastya, A. (2016). Konflik Kekerasan Antara Pendekar Silat Dalam Perspektif Sosiologi (Studi Konflik antar Pendekar Silat di wilayah Madiun). *Seminar Nasional FHSIP-UT 2016*, 125–140. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/7989/1/FISIP201601-8.pdf>
- Qodir, A. (2013, January 8). Alasan MK Bubarkan Sekolah RSBI. *Tribunnews.Com*.
- Raditya, A. (2014). *Sosiologi Tubuh: Membentang Teori di Ranah Aplikasi* (1st ed.; M. Mudzakkir, Ed.). Bantul: Kaukaba Dipantara.
- Riawanti, S. (2017). *Teori Tentang Praktik: Saduran Outline of a Theory of Practice*. Bandung: Ultimus.

- Rifai, M. A. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti dicitakan Pribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2016). *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Rumadi, & Fathurahman, W. R. (2010). *Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Salim, A. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Supraja, M., & Akbar, N. Al. (2020). *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Tohani, E., Sumarno, S., & Suryono, Y. (2016). Pendayagunaan Modal Sosial Dalam Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat: Studi Pada Program Pendidikan Desa Vokasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 3(2), 151–166. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i2.7534>
- Toyibah, D. (2017). Habitus, Agency and Political Participation of Female Students: A Study at an Islamic University in Indonesia. *Makara Hubs-Asia*, 21(2), 113–121.
- Utomo, D. H. (2014). *Representasi Pembisuan Wanita Di Dalam Rubrik Olahraga “Spirit” Pada Harian Umum Suara Merdeka*. Universitas Diponegoro.
- Weber, M. (2009). *Sosiologi* (2nd ed.; Noorkholis, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

